

DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN : STUDI PADA NEGARA KOREA SELATAN DAN NEGARA INDIA

¹ Dina Fadiyah, ² Muhamad Fathan Mandela

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Selamat Sri

Email: dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id

Received: 04 September 2025; Revised: 20 Oktober 2025; Accepted: 01 November 2025;

Published: Desember 2025; Available online: Desember 2025

Abstract

This research aims to explore the role of democracy as a primary instrument in achieving prosperity and the formation of a welfare state, by comparing the experiences of two Asian nations: South Korea and India. Utilizing a qualitative-descriptive approach and library research methodology, this article analyzes how democratic mechanisms influence the distribution of social security and the effectiveness of public policy. The findings indicate that South Korea's democratic transition following the 1980s transformed a previously limited social security system into an inclusive and collaborative model, with national insurance coverage reaching 98.6% of the population by 2018. Conversely, although India stands as the world's largest democracy, it faces significant hurdles in implementing welfare programs—such as the MGNREGA—due to prevailing practices of populism and clientelism that obstruct citizen accessibility. The comparison of these two countries underscores a positive correlation between a high democracy index and the successful development of a welfare state. In conclusion, a healthy and collaborative democracy is not merely a political procedure but a fundamental prerequisite for fostering equitable economic prosperity for all citizens.

Keywords: India, South Korea, Welfare State, Democracy, Social Security.

Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem yang mempunyai sejarah panjang menawarkan harapan dari lahirnya pemerintahan yang peduli terhadap rakyatnya, berasal dari jaman Yunani kuno hampir 500 tahun sebelum Masehi. Demokrasi bagaikan harapan setelah hak rakyat tidak diberikan pada saat itu, dengan kehadiran demokrasi kesetaraan dapat dihadirkan dalam ruang publik (Ober. 2008). Sejalan dengan itu Beethem (1999) memberikan pandangan bahwa kehadiran demokrasi bermuara pada apa yang disebut dengan kesetaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Kesetaraan dalam pandangan demokrasi berarti berujung pada kesejahteraan rakyatnya, perdebatan yang ada antara demokrasi dan kesejahteraan sampai saat ini masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan oleh para akademisi, meninggalkan sebuah pertanyaan apakah demokrasi menghasilkan kesejahteraan ataukah kesejahteraan yang menghasilkan demokrasi. Yang jelas Kevin Olson dalam (Purwanto & Syawie. 2012) menegaskan pemikir politik kontemporer mengalami krisis ketika aspek kesejahteraan absen dalam pembicaraan demokrasi, seharunya pembicaraan demokrasi tidak

terlepas dari aspek kesejahteraan dan mampu mensinergitaskan keduanya. Argumentasi yang jelas dari Kevin Olson tersebut seolah melegitimasi bahwa demokrasi dan kesejahteraan adalah paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Dibelahan dunia ini terdapat negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan mereka guna mencapai kesejahteraan untuk rakyatnya, sebut saja Korea Selatan dan India. Dimulai dengan Korea Selatan, negara dengan julukan negeri ginseng ini menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial campuran dimana Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat Korea Selatan dalam pemilihan umum yang digelar lima tahun sekali, sementara Perdana Menteri dan kabinet dipilih langsung oleh Presiden (Rachman. 2022)

Gerbang menuju demokrasi di Korea Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1980, menurut Oktaviani dan Mulyana (2018) ketika gerakan massa bernama demokratik Gwangju yang diisi oleh mahasiswa dan lapisan masyarakat Korea Selatan lainnya berusaha menghalangi terjadinya kudeta oleh kelompok militer yang baru. Gerakan

tersebut merupakan titik balik dalam demokratisasi di Korea Selatan yang diwujudkan dalam konfrontasi langsung antara kelompok pro demokrasi dengan militer yang berusaha melakukan kudeta saat itu. Gerakan demokratik Gwangju dilatarbelakangi oleh sistem kapitalis yang dikuasai oleh kelompok konglomerat Korea Selatan saat itu, walaupun pada saat itu ekonomi Korea Selatan sedang mengalami kejayaan akan tetapi para pekerja menjadi sarana eksplorasi dari sistem kapitalis yang ada.

Sebelum terjadinya gerakan pro demokrasi di Gwangju, Korea Selatan dipimpin oleh rezim junta militer Park Chung Hee, seperti diktator lainnya yang memerintah dengan tangan besi Park Chung Hee mampu menghadirkan stabilitas ekonomi maupun politik yang bertumpu pada militer, birokrat, maupun teknokrat dalam kendali sentralnya (Darini. 2010). Seperti sebuah karma yang membayangi Park Chung Hee, ketika dia mengambil alih kekuasaan dengan cara kudeta militer kemudian dia juga mengalami hal yang sama dengan dipaksa mundur dari jabatan Presiden oleh warganya sendiri, dan yang lebih mengenaskan dia meninggal di tangan kepala Badan Intelijen Pusat Korea Selatan tahun 1979. Walaupun mampu menghadirkan stabilitas politik maupun

ekonomi dimasa Presiden Park akan tetapi masyarakat Korea Selatan mengharapkan adanya pemerintahan yang lebih demokratis, hal itu pula yang menjadi salah satu penyebab gerakan demokratik Gwangju dimana gerakan itu harus mengorbankan ratusan nyawa manusia (Irfan, 2017). Selain itu penyebab munculnya gerakan demokratik Gwangju adalah peresmian konstitusi Yushin yang mana Presiden Park Chung Hee saat itu dimungkinkan menjadi presiden kembali setelah melewati dua periode (Korea Chobo. 2018).

Ekonomi Korea Selatan sepanjang dijalankan oleh pemerintahan yang otoriter bernuansa kapitalisme, akan tetapi kapitalisme di Korea Selatan berakhir pada saat krisis melanda Asia pada tahun 1997-1998, Iriansyah (2020) menilai sebelum terjadinya krisis Asia Korea Selatan adalah etalase kapitalisme Amerika Serikat yang dibangun dalam rangka menghadapi perang dingin dengan melawan sosialisme blok timur. Pasca krisis Asia Korea Selatan berangsur beralih dari tradisi kapitalisme menuju negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dilansir dari laman *korea.net* (2020) Korea Selatan menjalankan sistem kesejahteraan dengan norma Internasional, upah

minimum per jam untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar 8.590 Won. Skema asuransi diberikan terhadap perlindungan untuk bencana, penyakit, pengangguran dan kematian, tahun 2018 sekitar 51 juta penduduk korea selatan atau 98.8% dari penduduk Korea Selatan menikmati manfaat dari sistem asuransi kesehatan nasional. Serta skema asuransi lainnya seperti pensiun nasional, asuransi kesehatan nasional, asuransi ketenagakerjaan, dan asuransi kompensasi kecelakaan industri.

Sementara itu India sebagai negara yang menerapkan demokrasi juga mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, demokrasi di India disebut sebagai ajang pesta demokrasi terbesar didunia karena dalam pemilihan umum yang diselenggarakan diikuti oleh 900 juta manusia (CNBC Indonesia. 2019). Negara Bollywood ini menerapkan sistem Republik Federal dimana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (KBRI New Delhi. 2022)

Kehidupan demokrasi di India berasal dari atas, akan tetapi bukan dari kalangan borjuis seperti yang terjadi di Eropa, melainkan melalui koalisi antar elit politik dengan tiga kelompok utama, yaitu profesional perkotaan, komunitas

pengusaha india, dan para pemilik tanah dipedesaan. Demokrasi seperti ini mendahului partisipasi publik karena sudah terjadi negosiasi diantara elit politik tersebut, akan tetapi demokrasi seperti ini merupakan kondisi ideal dalam konteks transisi politik di negara berkembang (Flamirion & Muradi. 2016). Ketidakstabilan demokrasi di India terus berlanjut di era Perdana Menteri sekarang, demokrasi di India mengalami kemerosotan sejak pemerintahan Narendra Modi mempromosikan kampanye nasionalis-hindu, penurunan drastis itu mengacu pada indikator penyensoran media, represi organisasi masyarakat sipil, dan pelemahan otonomi lembaga pengelola pemilu (Margiansyah. 2021)

Kehidupan ekonomi India pada dekade pasca kemerdekaan tidaklah pesat bahkan menjurus kearah yang lamban, barulah dekade 1990-an ketika pemerintahan Rajiv Gandhi melalui menteri keuangan membuat program reformasi ekonomi perlahan tapi pasti ekonomi India tumbuh secara pesat. Reformasi ekonomi yang ada meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan serta kebijakan investasi asing langsung yang restriktif, sejak saat itu India muncul sebagai negara utama dalam teknologi

informasi dan komunikasi, dan *business process outsourcing* (BPO). Akan tetapi pertumbuhan usaha kecil dan industri padat karya sangat susah berkembang di India dan kurang menciptakan lapangan kerja baru, itu disebabkan oleh fokus mereka disektor jasa khususnya TIK dan BPO yang hanya memperkerjakan 5-10 juta pekerja terampil (Wie. 2009)

Seperti halnya Korea Selatan yang menuju *welfare state* atau negara yang peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, India mencoba hal serupa. Akan tetapi jika melihat Golechha (2015) terdapat paradoks yang membingungkan, dimana India tidak mampu memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi lebih 1.2 miliar warganya, padahal India adalah industri obat generik terbesar yang mengekspor obat-obatan ke lebih dari 100 negara.

Kemudian artikel ini akan melihat bagaimana pemerintahan yang demokratis mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya, dan apabila tidak tercapai faktor apa saja yang menyebabkan negara demokrasi tidak mampu menhadirkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui konsep negara kesejahteraan di Korea Selatan dan India.

Studi literatur dilakukan untuk melihat penelitian oleh penulis lain yang berkaitan dengan tema besar yang sedang penulis kerjakan, selain itu dengan melakukan studi literatur nantinya penulis akan menemukan kebaharuan dalam penulisan artikel yang sedang penulis kerjakan. Yang pertama studi literatur dari Dina Ratih Widuri tahun 2021 yang menulis tentang hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan warga di Eropa yang menggunakan Analisis *European Social Survey* tahun 2002-2018. Berkesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat eropa realif konstan dan memiliki nilai yang tinggi yaitu 6 dalam skala 1-10, masyarakat Eropa yang tinggal di negara yang lebih demokratis lebih sejahtera hidupnya dari pada mereka yang tinggal di negara yang kurang demokratis. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis statistika bahwa indikator demokrasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat eropa.

Kedua dari Aniken Yustisia Syahnaz tahun 2021 yang membahas soal korelasi antara negara kesejahteraan dengan demokratisasi kehidupan masyarakat sebagai wujud negara paripurna, Aniken dalam tulisannya berkesimpulan bahwa negara

kesejahteraan, negara paripurna dan demokratisasi masyarakat memiliki korelasi yang saling berkesinambungan sebab adanya negara yang sejahtera ini berakhir pada negara paripurna, negara yang dapat melindungi warga negaranya secara utuh dan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga adalah Nurul Hikmah tahun 2013 menulis tentang hubungan demokrasi dengan pembangunan ekonomi, berkesimpulan bahwa memahami demokrasi dan inti dari pembangunan ekonomi maka didapatkan bahwa demokrasi seharusnya berjalan seiringan dengan pembangunan ekonomi (kesejahteraan dan kemakmuran). Secara empiris telah jelas dibuktikan bahwa ada korelasi yang erat antara sistem politik yang ditempuh dengan tingkat kemajuan ekonomi. Tentu demokrasi menawarkan harapan untuk kesejahteraan yang ada.

Selanjutnya artikel dari Gunawan (2019) meneliti tentang peran negara dan penerapan pancasila dalam mewujudkan negara kesejahteraan di Indonesia, berkesimpulan bahwa konesp negara kesejahteraan atau *welfare state* di indonesia mengutamakan kesejahteraan warga negara dengan

bersumber pada pancasila yang mengedepankan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yang terakhir artikel dari Suharto (2006) disampaikan dalam seminar *Institute for Research and Empowerment* (IRE) dengan tema Peta dan Dinamika *Welfare State* Di Beberapa Negara yang membahas lebih dalam soal pelajaran yang bisa di petik oleh Indonesia. Suharto menjelaskan dalam artikelnya bahwa model *welfare state* beragam makna dan bentuknya, seperti model universal yang biasa dipakai oleh negara skandinavia, model korporasi, model residual, model minimal. *Welfare state* dalam penerapannya memang bukan hanya untuk kelompok miskin saja, oleh karena itu Suharto menilai bahwa *welfare state* tidak dapat menghapus kemiskinan. Untuk itu program sosial yang ada tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan.

Berdasarkan uraian studi literatur diatas menjelaskan bahwa demokrasi

dan kesejahteraan terdapat hubungan yang saling terikat, di beberapa negara demokrasi mampu mewujudkan kesejahteraan melalui program sosial yang negara berikan. Sejauh studi literatur yang penulis sampaikan tidak ada yang secara spesifik menjelaskan hubungan demokrasi untuk kesejahteraan di negara Korea Selatan dan India, untuk itu penulis akan menulis artikel tentang demokrasi jalan menuju kesejahteraan di negara Korea Selatan dan India karena terdapat kebaharuan dari studi literatur yang disampaikan diatas.

Dalam sejarahnya kita mengenal demokrasi dengan berbagai macam gaya dan pemahaman, demokrasi dipakai oleh banyak negara karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang mampu memberikan harapan terhadap kedaulatan rakyat. Menilik sejarah lahirnya demokrasi disebabkan kekuasaan feodal yang mengakar waktu itu, rakyat tidak diberikan keleluasaan untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Melihat asal usul nama demokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani dari gabungan kata demos dan kratos, demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Sehingga memiliki arti kekuatan rakyat. Akan tetapi kata demos disini mengacu pada badan

kolektif, dan kata kratos tidak pernah dipakai untuk jabatan, tetapi pemberdayaan atau kapasitas untuk melakukan sesuatu, sehingga setiap orang kata dalam demos berada dalam lingkup setara, dan akan menikmati akses ke kekuasaan publik (Ober, 2008)

Sementara itu beberapa faktor fundamental yang disampaikan oleh Beetham (1999) seperti soal publik, kontrol publik, urusan publik dan kesetaraan. Kendali oleh warga negara atau kontrol publik atas persoalan-persoalan kolektif mereka, dan kesetaraan antara warga negara dalam melaksanakan kendali tersebut merupakan prinsip-prinsip kunci dari demokrasi. Selanjutnya adalah urusan publik dapat dipraktekan mulai dari level terendah dari kehidupan terkecil misalnya bertetangga dan lingkungan kerja yang dapat mereka laksanakan sesuai kontrol diri mereka. Dalam skala yang lebih luas, yaitu dengan memberikan keputusan kolektif bagi diri mereka sendiri melalui pemilihan umum. Kemudian tentang aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif untuk kelompok mana pun, dari keluarga atau kelompok atau teman hingga asosiasi yang lebih besar adalah bagian dari publik itu sendiri

Kedua teori tersebut menekankan pada satu hal yaitu kesetaraan, bahwasannya demokrasi harus berujung pada kesetaraan dapat dilihat dari kesejahteraan yang mampu diciptakan dari negara demokratis. Dengan begitu menunjukan kejelasan bahwa demokrasi mampu membawa kesejahteraan bagi siapa saja negara yang mengadopsi sistem tersebut.

Menurut Hague dan Harrop (2004) negara kesejahteraan pertama kali dikembangkan oleh Jerman melalui kanselir Jerman saat itu Otto von Bismarck tahun 1871-1990, pemerintah jerman saat itu melakukan skema asuransi sosial seperti kecelakaan dan penyakit untuk pekerja industri mereka. Langkah cerdas pemerintah Jerman saat itu diikuti oleh banyak negara demokrasi lainnya hingga tahun 1920-an kesejahteraan bukan hanya berfokus pada kecelakaan dan penyakit tetapi sudah keranah asuransi pensiun dan tunjangan keluarga. Sampai pada tahun 1960-an dan 1970-an negara kesejahteraan mencapai puncaknya di negara barat terutama eropa utara.

Sementara itu Wang (2017) melihat perkembangan negara kesejahteraan berfokus pada eksplorasi variabel politik atau ekonomi, seperti industrialisasi, memobilitas sumber daya

kelas buruh, atau peran negara. Faktor politik dan ekonomi memang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan, namun kapasitas penjelasan yang ada terbatas pada ekspansi kuantitatif negara kesejahteraan dan tidak dapat menghadapi variasi histori atau historigrafi yang rinci dari negara kesejahteraan. Oleh karena itu para peneliti kontemporer mengeksplorasi keragaman negara kesejahteraan dan membuka bidang baru perbandingan lintas-nasional tentang rezim kesejahteraan.

Dalam negara kesejahteraan terdapat program kesejahteraan yang dibuat oleh negara sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap warga negaranya, walaupun disetiap negara mungkin berbeda perihal pembiayaan program kesejahteraan. Oleh karena itu Kwon (1999) membedakan peran negara dalam pembiayaan program kesejahteraan, menurutnya ada tiga intervensi negara dalam pembiayaan program kesejahteraan. Pertama negara selaku penyedia dan pembayar untuk layanan sosial, kedua negara sebagai pengatur kebijakan layanan sosial dengan produk undang-undang, ketiga adalah negara sebagai pemelihara pasar dimana layanan sosial diserahkan

kepada pasar tanpa campur tangan negara.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moelong (2015) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara pendekatan deskriptif memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada atau hasil penelitian dengan diuraikan dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan data dan fakta. Dalam penulisan artikel ini data dan fakta tentang mekanisme negara kesejahteraan di Korea Selatan dan India akan diuraikan secara deskriptif.

Karena penulis dalam mendapatkan data primer tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dalam metode pengambilan data. Menurut Ibnu, Mukhadis & Dasna (2003) sumber kepustakaan bisa berasal ensiklopedia, kamus, buku, direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang

masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang kita kerjakan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal terakreditasi, surat kabar dan yang lainnya yang masih relevan dengan tema besar demokrasi dan kesejahteraan di Korea Selatan dan India sebagai bahan pengambilan data.

Hasil dan Pembahasan

Dilansir dari laman *katadata.com* (2022) pada tahun 2021 negara dengan indeks demokrasi tertinggi dihuni oleh negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Swedia dan Islandia. Sejalan dengan itu *cncbindonesia.com* (2022) mengungkapkan bahwa negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi juga menempatkan negara-negara Skandinavia seperti Irlandia dan Norwegia. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa negara demokrasi seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya, walaupun dibeberapa negara yang sudah menerapkan sistem demokrasi tetap saja tidak sejahtera, itu disebabkan oleh pengaruh internal negara mereka.

Hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan adalah paket lengkap yang saling menguatkan satu sama lain, data dari *katadata.com* dan

cnnbc.indonesia.com diamini oleh Widuri (2021) yang menjelaskan bahwa di negara yang demokratis seperti di eropa tingkat kesejahteraan rakyatnya terjamin, demokrasi mampu menghadirkan kesejahteraan sebagai hasil dari sistem yang dianut.

Korea Selatan Sebagai Negara Kesejahteraan

Seperti halnya negara skandinavia di eropa, Korea Selatan juga mempunyai tingkat demokrasi yang cukup tinggi, berdarakan *Democracy Index 2021* Korea Selatan menempati urutan ke-16 dari 167 negara dalam hal negara yang demokratis (kbs.word. 2022). Negara demokratis Korea Selatan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warganya, dilansir dalam laman *korea.net* (2020) Korea Selatan menjalankan sistem tenaga kerja dan kesejahteraan berbasis norma internasional, pemberlakuan undang-undang yang setara antara laki-laki dan perempuan menghasilkan Korea Selatan sebagai negara dengan indeks kesetaraan gender yang bagus, bahkan Korea Selatan menempati peringkat ke-10 dari 189 negara. Terdapat juga skema asuransi sosial utama yaitu pensiun nasional, asuransi kesehatan nasional, asuransi ketenagakerjaan, dan asuransi kompensasi kecelakaan industri.. Semua

orang harus dilindungi oleh asuransi kesehatan nasional, melalui skema itu akhir tahun 2018 51 juta penduduk atau 98,6% dari seluruh penduduk Korea Selatan menikmati manfaat yang diberikan di bawah sistem asuransi kesehatan nasional yang dikelola negara.

Peralihan sistem pemerintahan dari otoritarianisme menuju demokrasi di Korea Selatan berdampak pula terhadap tingkat kesejahteraan warga Korea Selatan, seperti dalam hal upah minimum, tahun sebelum terjadinya gerakan Gwangju dimana titik awal kehidupan demokrasi diharapkan belum terdapat sistem upah minimun, barulah setelah kehidupan demokrasi terjadi tahun 1988 sistem upah minimum diterapkan di Korea Selatan, dan terus meningkat hingga 9.590 won ditahun 2020 (*korea.net*. 2020).

Ciri umum dari negara yang menerapkan sistem kesejahteraan untuk warganya dapat dilihat dari berbagai macam program jaminan sosial, Korea Selatan dimulai dari rezim Park Chun Hee memulai pembuatan jaminan sosial untuk warganya seperti program pensiun nasional, kwon (1999) menilai program itu awalnya hanya untuk legitimasi politik pemerintahan Park Chun Hee yang bersifat otoriter, program yang dimulai pada tahun 1973 akan

tetapi baru terealisasi pada tahun 1988 dimana Korea Selatan sudah demokratis. Dalam program ini mekanisnya adalah tempat kerja yang memiliki lebih dari sepuluh orang harus bergabung dengan program pensiun nasional, tetapi program ini bersifat sukarela untuk seluruh populasi pekerja. Sementara untuk sektor industri karyawan yang bekerja hanya membayar setengah dari kontribusi yang diperlukan, setengahnya harus dibayar oleh pemilik usaha tersebut. Sedangkan pemilik dan industri harus membayar penuh, karena peraturan industri menyumbang lebih dari 50 persen dari mereka yang berpartisipasi dalam program ini, yang pada tahun 1990 mencakup 15,7 persen dari populasi pekerja.

Kemudian program asuransi industri, Kwon (1999) mencatat skema asuransi kecelakaan industri menjadi program kesejahteraan wajib pertama yang diperkenalkan di Korea, alasan program ini dilaksanakan karena program asuransi ini mudah didanai dan diimplementasikan di Korea Selatan. Terlebih UU Standar Ketenagakerjaan tahun 1953 yang memberikan pekerjaan sudah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa memandang penyebabnya dan siapa yang harus disalahkan. Alasan

berikutnya CSS selaku komite jaminan sosial menilai bahwa buruh yang terluka akan berada dalam situasi keungan yang lebih sulit daripada pengguran yang berbadan sehat karena kehilangan kemampuan untuk bekerja.

Pada awal skema ini diperkenalkan hanya mencakup 500 karyawan atau lebih, kemudian jumlah orang yang ditanggung dalam asuransi ini terus meningkat, pada tahun 1987 pasca gerakan Gwangju yang menuntut demokrasi asuransi ini diperluas yang mancakup tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari lima orang. Dan pada tahun 1990 sekitar 41,3% orang yang bekerja masuk dalam skema asuransi ini, asuransi kecelakaan industri dibiayai oleh kontribusi dari pemberi kerja, dan pemerintah mensubsidi biaya administasi untuk mendirikan program tersebut di dua tahun pertama. Untuk mendapatkan kompensasi dalam asuransi ini kecelakaan harus terjadi dalam proses kerja dan penyebab kecelakaan harus terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan, asuransi ini cakupannya lebih luas dari sekedar asuransi, dimana 1975 hanya mampu membeli rumah sakit Changsong dan tahun 1990 dimana sistem demokrasi sudah berjalan di Korea Selatan dana asuransi menjalankan

tujuh rumah sakit, satu rehabilitas dan tiga pusat pelatihan.

Selain itu Korea Selatan juga mempunyai program jaminan sosial berupa bantuan publik, Kwon (1999) mencatat bahwa program bantuan publik diberlakukan pertama kali pada tahun 1965 dimasa pemerintahan otoritarianisme Park Chun Hee. Dimasa rezim terebut cakupan program ini terbatas barulah setelah pemerintahan yang demokratis pada tahun 1990 Program Bantuan Publik mencakup 7,7% dari populasi masyarakat Korea Selatan.

Selanjutnya adalah program asuransi kesehatan nasional, Kwon (1999) menyebut program ini berawal dari pemerintahan otoritarianisme Park Chun Hee, yang pada saat itu hanya segelintir orang yang mendapatkan program ini, kemudian tahun 1977 asuransi kesehatan nasional menjadi program wajib, pada tahun 1978 hanya 10,49% masyarakat Korea Selatan yang mendapatkan akses asuransi ini. Terbatasnya akses warga Korea Selatan selama pemerintahan yang otoriter tidak terjadi setelah demokratisasi terjadi di Korea Selatan, kemudian pasca gerakan demokratisasi Gwangju tahun 1987 meningkat menjadi 51,13% dan terus meningkat ke angka 92.3% pada tahun 1990. Bahkan ketika indeks demokrasi

Korea Selatan terus membaik pada tahun 2018 51 juta penduduk atau 98,6% dari seluruh penduduk Korea Selatan menikmati manfaat yang diberikan di bawah sistem asuransi kesehatan nasional yang dikelola negara.

Semua program kesejahteraan sosial yang ada adalah bagian dari pengembangan dimasa pemerintah yang demokratis yang kolabiratif, ketika krisis Asia terjadi tahun 1997 dan 1998 pemerintahan Kim Dae-Jung segera membentuk Komisi Tripartit yang mengkonsolidasikan perwakilan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari Konfederasi Korea, Serikat Pekerja (KCTU) dan Federasi Serikat Pekerja Korea (FKTU), pengusaha, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk menyusun agenda reformasi kesejahteraan sosial di Korea Selatan, Kemudian tahun 1998 aliansi masyarakat pro kesejahteraan yang terdiri dari lebih dari 20 organisasi sipil dan serikat pekerja mengajukan petisi untuk reformasi kesejahteraan total. Kolaborasi disistem demokrasi ini mengakibatkan pemerintah Korea Selatan memperluas cakupan dan cakupan program bantuan publik yang ada. Bahkan ketika pemerintah Moon Jae-In yang progresif berkuasa tahun 2017 serikat pekerja mendapat posisi tawar yang menguntungkan dalam

pembuatan kebijakan berujung pada munculnya inisiatif kebijakan proworker yang bertujuan untuk mendorong full employment, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan tunjangan kesejahteraan (Adhisatya. 2021).

Korea Selatan berdasarkan uraian diatas dapat dijadikan contoh bahwa negara yang menerapkan sistem demokrasi memiliki peluang untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya semakin terbuka lebar, walaupun program jaminan sosial pertama dibuat dimasa pemerintahan yang otoriter, itu dilakukan sebagai legitimasi kekuasaan rezim saat itu untuk mendapatkan pengakuan dari warga Korea Selatan. Akan tetapi pasca era demokratisasi terjadi di Korea Selatan perlahan dan pasti pemerintahan yang lebih demokratis mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warga Korea Selatan. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Wang (2017) bahwa Korea Selatan berhasil dalam mewujudkan negara kesejahteraan karena adanya peran serikat buruh yang kuat dan peran pemerintah yang demokratis terlihat dari mampu berkolaborasi dengan aktor non negara, seperti buruh, pengusaha dan masyarakat sipil.

India Menuju Negara Kesejahteraan

India sebagai negara dengan indeks demokrasi nomor 46 di dunia (jagranjosh.com. 2022) tetapi dalam laporan lembaga *think tank Freedom House* tahun 2020 bahwa demokrasi di India mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, akan tetapi hal itu tidak menghilangkan niat India untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Pemerintahan Indira Gandhi memulai program kesejahteraan sosial pada tahun 1970 dan 1980-an dengan telah terjadinya proliferasi program anti-kemiskinan yang berfokus pada kebutuhan dasar seperti penciptaan lapangan kerja dengan upah dan peluang untuk wirausaha serta alokasi makanan melalui sistem distribusi publik dan makanan untuk anak-anak sekolah. Selain itu terdapat program seperti *National Rural Employment Guarantee Act* atau NREGA atau biasa disebut MGNREGA mendesain program sosial dengan anggaran yang sangat besar mencapai \$8,9 miliar USD pada tahun 2010 dimana itu sekitar 0.5% dari PDB. *Targeted Public Distribution System* (TPDS), yang mendistribusikan makanan dan non-makanan kepada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mencakup lebih dari 23% rumah tangga di India dan beroperasi dengan anggaran tahunan sebesar \$9,7 miliar USD. Selain

itu terdapat program sosial lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah India seperti *Sara Shiksha Abhiyan* (SSA) atau kampanye pendidikan untuk semua, misi kesehatan pedesaan nasional (NRHM), *pradhan mantri gram sadak yojana* (PMGSY) atau program mendanai jalan pedesaan, Skema makan siang yang mendanai makan siang di sekolah-sekolah, *indira awaas yojana* (IAY) program yang mendanai perumahan pedesaan dan skema pensiun usia tua nasional atau Indira Gandhi (IGNOAPS). Skema kesejahteraan yang disponsori secara terpusat semacam ini berkembang pesat pada tahun 1990-an (Kruks & Wisner. 2018).

Program kesejahteraan yang digaungkan oleh pemerintah India mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan, seperti Chhibber dan Soz (2021) menilai India tidak bisa hanya mengandalkan kesejahteraan gaya barat, contohnya program *National Rural Employment Guarantee Act* atau NREGA atau biasa disebut MGNREGA. Menurutnya program MGNREGA mengalami masalah dalam implementasinya seperti skema yang terlalu rumit karena memiliki tujuh tujuan yang dinyatakan sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan, terutama karena tidak satu pun dari ketujuh tujuan

tersebut memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas.

Sejalan dengan itu Golechha (2015) melihat terdapat paradoks dalam melihat India sebagai negara kesejahteraan, pasalnya terdapat hal yang membingungkan, dimana India tidak mampu memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi lebih 1,2 miliar warganya, padahal India adalah industri obat generik terbesar yang mengekspor obat-obatan ke lebih dari 100 negara, sistem kesehatan masyarakat yang dibiayai dengan buruk (kurang dari 1,04% dari PDB). Akibatnya lebih dari 40 juta orang yang sebagian besar diwilayah pedesaan dimiskinkan oleh sistem kesehatan yang ada dan memiliki hutang yang cukup besar untuk mengakses perawatan kesehatan.

Kritikan juga datang dari Javal (1999), dia menilai menilai bahwa India dicirikan sebagai negara interventionis (dengan dorongan pembangunan) daripada negara kesejahteraan, prakarsa pembangunan negara interventionis sebagian besar diarahkan kepada sebagai sektor industri yang modern dan dinamis. Sementara itu sisi negara kesejahteraan-nya diarahkan secara substansial ke arah perbaikan ketidaksetaraan yang dihasilkan bukan oleh pasar tetapi berasal dari

ketidaksetaraan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, dengan demikian program pengentasan kemiskinan bersifat kompensasi.

Baik Korea Selatan maupun India dalam menciptakan kesejahteraan dimulai dari peran negara melalui penyediaan kesejahteraan dan regulasi undang-undang, sesuai apa yang dikatakan Kwon (1999) salah satu bentuk intervensi negara dalam menciptakan negara kesejahteraan adalah dengan penyediaan pelayanan kesejahteraan dan pembuatan undang-undang. Persamaan dalam bentuk intervensi negara tidak serta merta membentuk persamaan dalam hasil yang dicapai.

Berbeda dengan Korea Selatan yang pada awal dekade kemerdekaan dipimpin rezim otoriter, akan tetapi mampu merubah sistem yang ada. India belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang ada walaupun program-program kesejahteraan sudah dirancang sedemikian rupa. Berdasarkan uruain diatas dapat dilihat penyebab program kesejahteraan tidak mampu berjalan dengan baik, salah satu faktor penyebabnya adalah pemimpin India beraliran Populis, dimana mereka membuat program yang sedang populer tanpa memperhatikan hal lain, selain itu kleintalisme di India masih sangat jamak

ditemui, hal itu menyebabkan program diberikan terhadap mereka yang memiliki akses ke penguasa. (Kruks & Wisner. 2018). Ketidakcermatan pemerintah India dalam mewujudkan kesejahteraan berbanding lurus dengan kemerosotan demokrasi yang dialami negara itu (lihat think tank Freedom House. 2020). Berbeda dengan Korea Selatan yang menjalankan pemerintah demokrasi kolaboratif mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Kesimpulan

Welfare state atau negara kesejahteraan adalah bagian dari sistem demokrasi yang dijalankan, memang benar bahwa sebagian negara dengan sistem demokrasi tetap saja dalam keadaan tidak berdaya secara ekonomi, akan tetapi studi lebih komprehensif menunjukan bahwa demokrasi mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Program kesejahteraan sosial disetiap negara tentu berbeda nama dan pembiayaannya, akan tetapi memiliki maksud yang sama yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Korea Selatan berdasarkan uraian diatas dapat dijadikan contoh bahwa negara yang menerapkan sistem demokrasi memiliki peluang untuk

menciptakan kesejahteraan bagi warganya semakin terbuka lebar, walaupun program jaminan sosial pertama dibuat dimasa pemerintahan yang otoriter, itu dilakukan sebagai legitimasi kekuasaan rezim saat itu untuk mendapatkan pengakuan dari warga Korea Selatan. Akan tetapi pasca era demokratisasi terjadi di Korea Selatan perlahan dan pasti pemerintahan yang lebih demokratis mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warga Korea Selatan dengan fakta perluasan program sosial semakin meningkat setelah pemerintahan Korea Selatan yang demokratis.

Walaupun menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi sama seperti Korea Selatan, India belum mampu mencapai negara kesejahteraan seperti hal nya Korea Selata. India masih memiliki masalah internal negara mereka yang harus terselesaikan dengan baik jika berkeinginan menjadi negara yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi warga mereka, Pejabat negara yang bersifat populis dan klientalisme yang masih banyak ditemukan adalah faktor penghambat dari negara demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan, hal itu juga yang menjadi penyebab India belum mampu sejajar dengan Korea

Selatan dalam memberikan kesejahteraan bagi warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisatya, Alfan Prahasta. (2021). Mengelola Kebijakan Sosial Dalam Rezim Pemerintahan Kesejahteraan Yang Sedang Berkembang : Apa Yang Dapat Dipelajari Indonesia Dari Pengalaman Korea Selatan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2567210>
- Beetham, David. (1999). Democracy And Human Rights. Cambridge : Polity Press
- Binekasri, Romys. (2022). Ini 10 Negara dengan Penduduk Termakmur, Bukan AS Nomor1.CNBCIndonesia.<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220801102930-17-360066/ini-10-negara-dengan-penduduk-termakmur-bukan-as-nomor-1>
- Chhibber, Ajay & Soz, Anees S. (2021). India is becoming welfare state before developed state. But even welfare it does badly. The Print. <https://theprint.in/pageturner/excerpt/india-is-becoming-welfare-state-before-developed-state-but-even-welfare-it-does-badly/772397/>

Darini, Ririn. (2010). Park Chung Hee Dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. Mozaik. Volume V Nomor 1.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4336>

Deutsche Welle (DW). (2020). Freedom House: Demokrasi dan Kebebasan di Dunia Mengalami Kemunduran. Detik.com.
<https://news.detik.com/dw/d-4928384/freedom-house-demokrasi-dan-kebebasan-di-dunia-mengalami-kemunduran>

Flamirion, Gemael & Muradi. (2016). Demokrasi Civil Society Di Indonesia Dan India : Sebuah Perbandingan. Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2, Oktober
<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11061>

Golechha, Mahaveer. (2015). Healthcare agenda for the Indian government. Indian J Med Res. Volume 141(2): 151–153.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4418149>

Gunawan, Belinda. (2019). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Di Indonesia. Vol. 4 No. 02. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan.

<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1642>

Hague, Rod & Harrop, Martin. (2004). Comparative Government and Politics An Introduction 6th Edition. New York : Palgrave Macmillan

Hikmah, Nurul. (2013). Hubungan Antara Demokrasi Dengan Pembangunan Ekonomi. Jispar. Vol. 2 No. 2.
<https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/359>

Ibnu, S. Mukhadis, A & Dasna, IW. (2003). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang : Lemlit UM

Irfan, Reza M F. (2017). Kisah Taksi Kuning dan Pembantaian Mahasiswa Gwangju 1980. Tirto.id.
<https://tirto.id/kisah-taksi-kuning-dan-pembantaian-mahasiswa-gwangju-1980-cxNZ>

Iriansyah, Herianto S. (2020). Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan). Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara.
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/277>

Jagranjosh. (2022). Democracy Index 2021: Check the top and bottom

nations, highest-ranked region in the world, India rank, and more. Jagranjosh.com.
<https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/democracy-index-2021-1644567197-1>

Jayal, Gopal N. (1999). Democracy And The State Welfare, Secularism, And Development In Contemporary India. Delhi : Oxford University Press

KBRI New Delhi. (2022). Country Profile India.
<https://kemlu.go.id/newdelhi/en/read/country-profile-india/2228/etc-menu>

KBS-Word-Indoensia. (2022). Level Demokrasi Korea Selatan Tempati Urutan ke-16 dari 167 Negara.
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=65797

Korea Chobo. (2018). Pemberontakan Gwangju, Perjuangan Rakyat Untuk Demokrasi Korea: Bagian 1. Kumparan.com.
<https://kumparan.com/korea-chobo/pemberontakan-gwangju-perjuangan-rakyat-untuk-demokrasi-korea-bagian-1/2>

Korea net. (2020). Labor and Social Welfare System.
<https://www.korea.net/AboutKore>

a/Society/Labor-Social-Welfare-System

Kruks, Gabrielle & Wisner. (2018). Claiming the State Active Citizenship and Social Welfare in Rural India. Cambridge : Cambridge University Press

Kwon, Huck-ju. (1999). The Welfare State in Korea The Politics of Legitimation. New York : Palgrave Macmillan

Margiansyah, Defbry. (2021). Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2021, Vol. 11, No. 2.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/13868>

Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Ober, Josiah, (2008), The Original Meaning of “Democracy”: Capacity to Do Things, not Majority Rule, Constellations Volume 15, No 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1024775#main_content

Oktaviani, Retno A & Mulyana Agus. (2018). Perlawan Masyarakat Korea Selatan Menuju Gerbang

Demokrasi Tahun 1980. Factum. Volume 7, N0.2. <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/15608>

Purwanto, Agus B & Syawie M. (2012). Demokrasi dan Kesejahteraan (*Democracy and Welfare*). Informasi, Vol. 17, No. 01. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/64>

Rachman, Ani. (2022). Korea Selatan: Keadaan Alam, Perekonomian, dan Bentuk Pemerintahannya. [http://www.kompas.com/skola/read/2022/09/23/090000169/korea-selatan--keadaan-alam-](http://www.kompas.com/http://www.kompas.com/skola/read/2022/09/23/090000169/korea-selatan--keadaan-alam-)

Rizaty, Monavia A (2022). 10 Negara dengan Indeks Demokrasi Tertinggi (2021). <https://databoks.katadata.co.id/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>

Sebayang, Rehia. (2019). Terbesar di Dunia, Seperti Ini Suasana Pemilu India. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190411174623-4-66143/terbesar-di-dunia-seperti-ini-suasana-pemilu-india>

Suharto, Edi. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara : Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia ?. <http://policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>

Syahnaz, Aniken Yustisia. (2021). Korelasi antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna. Jurnal Spektrum Hukum Vol 18, No 1. <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1624>

Wang, Hye Suk. (2017). *Familial Foundations of the Welfare State Building the National Health Insurance Systems in South Korea and Taiwan*. Switzerland : Palgrave Macmillan

Widuri, Dina Ratih. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2018. JIAP Vol 7, No 2, pp 306-318. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1123>

Wie, Thee Kian. (2009). Pencapaian dan Tantangan Ekonomi India. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. <http://lipi.go.id/berita/pencapaian>

-dan-tantangan-ekonomi-

india/3308